



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dan masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 berlaku dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, serta sub kegiatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Desember 2021

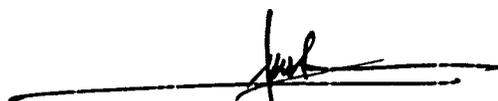
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

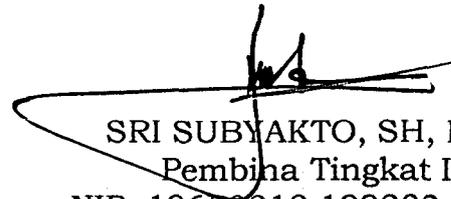
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat	Angka kriminalitas	Angka	$\frac{\text{Jumlah kasus kejahatan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	$\frac{\text{hazard (bahaya)} \times \text{vulnerability (kerentanan)}}{\text{capacity (kapasitas)}}$
2.	Mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Hasil evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB
3.	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$
4.	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	$IPJ = 1/3 (X_{\text{ade(1)}} + X_{\text{ade(2)}} + I_{\text{inc-dis}})$ Ket : X ade(1) = X ade untuk harapan hidup X ade(2) = X ade untuk pendidikan I inc-dis = Indeks distribusi pendapatan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
5.	Meningkatkan nilai-nilai budaya, toleransi dan karakter bangsa	Indeks Kebudayaan	Indeks	$\sum_{j=1}^7 (W_j * Indeks D_j)$ <p>Keterangan: Dj : Dimensi ke-j Wj : Bobot dimensi ke-j Indeks Dj : Indeks Dimensi ke-j</p>
		Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	Perhitungan dari tiga dimensi utama: toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama
6.	Meningkatkan penanganan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial	Angka kemiskinan	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
7.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dalam rangka penurunan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$
8.	Meningkatkan sinergitas pembangunan desa dan kota dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah	Indeks Desa Membangun	Indeks	$\frac{1}{3} (IS + IEK + IL)$ <p>Keterangan: IS : Indeks Sosial IEK : Indeks Ekonomi IL : Indeks Lingkungan (ekologi)</p>

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
		Indeks ketimpangan antar wilayah	Indeks	$\frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{y})^2 f_i / n}}{\bar{y}}$ <p>Keterangan: fi : Jumlah penduduk Kecamatan ke-i n : Jumlah penduduk Kabupaten/Kota Yi: Skor infrastruktur Kecamatan ke-i \bar{y} : Skor infrastruktur Kabupaten/Kota</p>
9.	Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi unggulan dalam upaya kemandirian ekonomi daerah	Pertumbuhan ekonomi Laju Inflasi	% %	$\frac{\text{PDRB ADHK } n - \text{PDRB ADHK } (n - 1)}{\text{PDRB ADHK } (n - 1)} \times 100$ $\{[(1 + \Delta \text{Inf}_1)(1 + \Delta \text{Inf}_2) \dots (1 + \Delta \text{Inf}_t)]^{1/t} - 1$ <p>Dimana : ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi. Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut :</p> $\Delta \text{Inf} = \frac{\text{Inf}_{(n+1)} - \text{Inf}_{(n)}}{\text{Inf}_{(n)}} \times 100\%$ <p>Dimana : Inf_n = nilai inflasi pada tahun n Inf_(n+1) = nilai pada 1 tahun berikutnya n = tahun ...</p>

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
11.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur, meliputi: 1. Jalan 2. Irigasi 3. Air minum 4. Drainase 5. persampahan 6. RTH 7. LPJU 8. Rumah susun 9. APILL 10. Perpakiran 11. Terminal 12. Hotspot
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Indeks	$(0,376 \times \text{Indeks Kualitas Air}) + (0,405 \times \text{Indeks Kualitas Udara}) + (0,219 \times \text{Indeks Kualitas Lahan})$

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG


 SRI SUBYAKTO, SH, MSi
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

cap
 ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 – 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021 – 2026**

A. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan kinerja penyelenggaraan emerintah daerah dengan mengedepankan prinsip <i>good governance</i>	Persentase peningkatan kinerja penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakn pemerintahan di bawah bidang pemerintahan dan kesra, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum	%	$\frac{\text{Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan dan kesra} + \text{Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian dan pembangunan} + \text{Persentase tkoordinasi penyelenggaraan urusan di bidang administrasi umum}}{3}$

B. SEKRETARIAT DPRD

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD yang prima	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Cakupan layanan Sekretariat DPRD	%	$\frac{\text{Persentase dukungan pelaksanaan tupoksi DPRD yang tersedia} + \text{Persentase dukungan pelaksanaan tugas fungsi lain DPRD} + \text{Persentase layanan kepada DPRD yang tersedia}}{3}$

C. INSPEKTORAT

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Terselenggaranya pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam mewujudkan Birokrasi yang transparan dan akuntabel	Implementasi Penyelenggaraan SPIP	Skor	Hasil Evaluasi dari BPKP
2.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pemalang	Level	Hasil Evaluasi dari BPKP
3.	Meningkatnya pelayanan kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

D. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama sekolah	Tahun	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah}$
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$
2.	Meningkatnya partisipasi sekolah masyarakat	Angka Partisipasi Sekolah PAUD (warga negara usia 4-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD)	%	$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang PAUD}}{\text{Jumlah penduduk usia 4 - 6 tahun}} \times 100$
		Angka Partisipasi Sekolah dasar (warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam SD/MI)	%	$\frac{\text{Jumlah siswa pada SD, MI, Paket A}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100$
		Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam SMP/MTs)	%	$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang SMP, MTs, Paket B}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100$

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
		Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	%	$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C}}{(\text{Jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun}) - (\text{Jumlah siswa jenjang SD, SMP, SMP})} \times 100$
		Sekolah Terakreditasi minimal B	%	$\frac{\text{Jumlah SD/SMP terakreditasi B}}{\text{Jumlah SD/SMP}} \times 100$
3.	Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya benda yang ditetapkan dan persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan sesuai dengan UU 11 tahun 2010 dan UU 5 tahun 2017	%	$\frac{\text{Persentase warisan budaya yang ditetapkan} + \text{Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan (sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2010 dan UU Nomor 5 Tahun 2017)}}{2}$
		Cakupan warisan budaya yang dilestarikan	%	$\frac{\text{Warisan budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah warisan budaya yang diregistrasi}} \times 100$

E. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan karakter dan kualitas pemuda yang berdaya saing	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16 – 30 tahun) yang berwirausaha}}{\text{Total jumlah pemuda (16 – 30 tahun)}} \times 100$
2.	Meningkatnya jumlah pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16 – 30 tahun) anggota aktif organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat}}{\text{Total jumlah pemuda (16 – 30 tahun)}} \times 100$
3.	Meningkatkan kualitas kesehatan, kebugaran, dan prestasi pada bidang olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	Jumlah perolehan medali pada acara olahraga regional, nasional dan internasional
4.	Meningkatnya kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD	Persentase kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD	%	$\frac{\text{Jumlah retribusi PAD sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PAD Kabupaten}} \times 100$

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
5.	Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara perkebangsaan	%	$\frac{\text{Jumlah wisman tahun } n - \text{Jumlah wisman tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah wisman tahun } (n - 1)} \times 100$
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	$\frac{\text{Jumlah wisnus tahun } n - \text{Jumlah wisnus tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah wisnus tahun } (n - 1)} \times 100$
6.	Meningkatnya tingkat hunian akomodasi	Persentase tingkat hunian akomodasi	%	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100$

F. DINAS KESEHATAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per-100.000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan, dan paska persalinan}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 100.000$
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per-1.000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi usia 0 - 11 bulan}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1.000$
		Persentase Balita Stunting	%	$\frac{\text{Jumlah balita kategori stunting (pendek sangat pendek)}}{\text{Jumlah balita}} \times 100$
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	Angka hasil perhitungan dari 12 indikator Keluarga Sehat dari setiap keluarga dalam satu wilayah pada kurun waktu tertentu dengan skala 0-1 (Sumber: Kemenkes)
		Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

G. DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS	Persentase PMKS yang ditangani	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang ditangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Pemalang}} \times 100$
2.	Menurunkan angka kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>ASFR_i : ASFR untuk wanita pada kelompo usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49</p>
3.	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	$\frac{1}{3} (\text{Ipar} + \text{IDM} + \text{Iinc-dist})$ <p>Ipar : Indeks Keterwakilan di parlemen IDM : Indeks Pengambilan Keputusan Iinc-dist : Indeks Distribusi Pendapatan</p>
4.	Meningkatnya kinerja pelayanan wajib urusan sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

H. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	$\frac{\text{Persentase kepemilikan dokumen kependudukan} + \text{Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil} + \text{Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama} + \text{Persentase peningkatan kualitas data kependudukan} + \text{Persentase peningkatan kualitas informasi kependudukan}}{5}$

I. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya keberdayaan desa	Persentase desa berdaya	%	$\frac{\text{Jumlah desa berdaya}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100$
		Jumlah desa berdaya	Desa	Desa yang memenuhi kriteria: 1. Memiliki batas desa 2. Sarana dan prasarana kewenangan desa dalam kondisi baik 3. PADes-nya meningkat dari hasil kerjasama desa 4. Buku administrasi pemerintahan desanya lengkap 5. Penyusunan dokumen pemerintahan desa-nya tepat waktu 6. Digitalisasi administrasi pemerintahan desa dan layanan masyarakat 7. Memiliki Lembaga Keuangan Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat yang berdaya

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
2.	Meningkatnya pelayanan kinerja Dinpermasdes	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

J. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	%	$\frac{\text{Realisasi investasi tahun } n - \text{Realisasi investasi tahun } (n - 1)}{\text{Realisasi investasi tahun } (n - 1)} \times 100$
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

K. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$
2.	Meningkatnya usaha mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	%	$\frac{\text{UMKM yang naik kelas menjadi kategori usaha kecil}}{\text{Jumlah seluruh UMKM}} \times 100$
3.	Peningkatan pertumbuhan	Persentase pertumbuhan sektor Industri pengolahan dalam PDRB	%	$\frac{\text{Capaian sektor industri pengolahan tahun } n - \text{Capaian sektor industri pengolahan tahun } (n - 1)}{\text{Capaian sektor industri pengolahan tahun } n - 1} \times 100$

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
4.	Peningkatan pertumbuhan	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi, mpbil dan sepeda motor dalam PDRB	%	$\frac{\text{Capaian sektor perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun } n - \text{Capaian sektor perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun } (n - 1)}{\text{Capaian sektor perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun } (n - 1)} \times 100$

L. DINAS TENAGA KERJA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran serta perlindungan tenaga kerja	Indeks Ketenagakerjaan	%	$\frac{\text{Persentase pelatihan berbasis kompetensi} + \text{Persentase tenaga kerja yang ditempatkan} + \text{Persentase hubungan industrial}}{3}$
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

M. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Digitalisasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Pemalang	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	Indeks komposit SPBE berdasarkan: 1. Kepemilikan Arsitektur SPBE 2. Kepemilikan Peta Rencana SPBE 3. Pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE 4. Penerapan Manajemen Layanan SPBE 5. Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik 6. Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
				7. Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik
2.	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	Persentase Network Terintegrasi	%	$\frac{\text{Jumlah jaringan (network) perangkat daerah dan layanan publik yang terintegrasi}}{\text{Jumlah seluruh perangkat daerah dan layanan publik}} \times 100$
3.	Meningkatnya keamanan informasi dan mendukung SPBE	Tingkat/Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dilihat dari Indeks KAMI
4.	Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik	Indeks/nilai Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	
5.	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	%	$\frac{\text{Jumlah data statistik sektoral yang berkualitas sesuai standar}}{\text{Jumlah seluruh data statistik sektoral}} \times 100$
6.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik	Persentase penduduk yang terpapar informasi publik	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terpapar informasi publik}}{\text{Jumlah penduduk usia (usia 17 tahun ke atas)}} \times 100$
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan komunikasi dan informatika	Indeks	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

N. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Terselenggaranya bangunan gedung pemerintahan yang optimal dan sesuai regulasi	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan	%	$\frac{\text{Total bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik}}{\text{Total bangunan gedung pemerintahan}} \times 100$
2.	Meningkatnya akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang terlayani}}{\text{Jumlah total penduduk di Kab. Pemalang}} \times 100$

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
3.	Meningkatnya akses sanitasi lingkungan layak bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik layak}}{\text{Jumlah total rumah tangga}} \times 100$
		Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar	%	$\frac{\text{Jumlah TPS/TPST/TPS3R sesuai standar yang terbangun}}{\text{Jumlah kebutuhan TPS/TPST/TPS3R di Kabupaten}} \times 100$
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah panjang drainase kabupaten (perkotaan)}} \times 100$
4.	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Persentase terhubungnya konektivitas antarwilayah	%	$\frac{\text{Panjang jalan yang sudah terkoneksi}}{\text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100$
5.	Meningkatnya kondisi jalan matap	Persentase panjang jalan kondisi mantap	%	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik + sedang}}{\text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100$
6.	Meningkatnya pelayanan sistem irigasi	Indeks kinerja sistem irigasi	%	Indeks yang diperoleh dari penjumlahan: 1. Aspek kondisi prasarana fisik (45%) 2. Aspek produktivitas pertanian (15%) 3. Aspek sarana penunjang (10%) 4. Aspek organisasi personalia (15%) 5. Apek dokumentasi (5%) 6. Aspek kondisi P3A (10%)
7.	Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang wilayah sesuai RTRW	%	$\frac{\text{Jumlah rencana pemanfaatan ruang yang dimohonkan}}{\text{Jumlah rencana pemanfaatan ruang yang dimohonkan sesuai dengan RTRW}} \times 100$

O. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan	Persentase kawasan kumuh	%	$\frac{\text{Luas wilayah permukiman kumuh yang belum tertangani}}{\text{Jumlah kawasan kumuh perkotaan}} \times 100$
2.	Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persentase RTLH yang tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah rumah Tidak Layak Huni yang tertangani}}{\text{Jumlah Rumah Tidak layak Huni}} \times 100$
3.	Berkurangnya sengketa tanah garapan	Persentase sengketa tanah garapan tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah segketa tanah garapan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah sengketa tanah garapan}} \times 100$
4.	Meningkatnya sertifikasi kepemilikan hak atas tanah	Persentase sertifikasi kepemilikan hak atas tanah terfasilitasi	%	$\frac{\text{Jumlah sertifikat yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pemohon sertifikat hak atas tanah}} \times 100$

P. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya antarwilayah konektivitas	Rasio konektivitas	%	$\frac{\text{Jumlah trayek angkutan jalan (umum)}}{\text{Jumlah trayek angkutan jalan (umum) yang seharusnya tersedia}} \times \text{Bobot angkutan jalan (umum)}$
2.	Meningkatnya pelayanan angkutan	Persentase pelayanan angkutan jalan	%	$\frac{\text{Persentase angkutan umum yang di revitalisasi optimalisasi layanan angkutan umum}}{\text{Angkutan yang ada}} \times 100$
3.	Meningkatnya sarana prasarana perhubungan	<i>Level of Service</i>		$\frac{\text{V/C rasio perkotaan Kabupaten Pemalang}}{\text{Jumlah jalan}}$

Q. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Terkendalinya sumber sumber pencemar Udara	Indeks Pencemaran Udara	Indeks	$100 - [50/0.9 \times (leu - 0.1)]$
2.	Terkendalinya sumber-sumber Pencemar Air	Indeks pencemaran Air	Indeks	$\Sigma (\text{setiap kategori status mutu}) \Sigma (\text{status mutu air}) * 100$
3.	Meningkatnya luasan tutupan vegetasi	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	$100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$

R. DINAS PERTANIAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	%	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100$
2.	Meningkatkan produktivitas dan produksi sektor pertanian	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	$\frac{\text{Nilai sektor pertanian}}{\text{Nilai produksi Domestik Regional Bruto}} \times 100$

S. DINAS PERIKANAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan produksi dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal	Persentase produksi sektor perikanan terhadap PDRB	%	$\frac{\text{Nilai sektor perikanan}}{\text{Nilai produksi Domestik Regional Bruto}} \times 100$
2.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Kg	Jumlah produksi perikanan tangkap yang diperoleh
3.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Kg	Jumlah produksi perikanan budidaya yang diperoleh
4.	Peningkatan produksi hasil olahan perikanan	Jumlah produksi hasil olahan perikanan	Kg	Jumlah produksi hasil olahan perikanan yang diperoleh

T. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan budaya literasi di masyarakat	Nilai budaya literasi	%	$\frac{\text{Persentase penduduk yang membaca media cetak/elektronik} + \text{Persentase penduduk yang mengakses internet} + \text{Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan}}{3}$
2.	Meningkatnya budaya literasi di masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	$\sum \frac{UPLMi}{AM} \times 100$
3.	Meningkatnya pelayanan kinerja Dinpusarda	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil Survei kepuasan Masyarakat
4.	Meningkatkan birokrasi akuntabel	Indeks kearsipan	Indeks	Nilai indeks kearsipan eksternal (60%)+Nilai indeks kearsipan internal (40%)
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan	Persentase OPD yang mampu mengeloa arsip dengan baik	%	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah dibina (dimonev)}}{\text{Jumlah seluruh perangkat daerah}} \times 100$

U. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perbup}}{\text{Jenis pelanggaran yang diatur dalam Perda/Perbup}} \times 100$
		Persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum	%	$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang pelanggaran Perda/Perbupnya menurun}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100$
2.	Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran	Rasio kejadian kebakaran	%	$\frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)}}{\text{Jumlah wilayah WMK}} \times 100$

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
		Cakupan pelayanan kebakaran	%	$\frac{\text{Jumlah luas WMK}}{\text{Luas wilayah kabupaten}} \times 100$
3.	Meningkatnya pelayanan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

V. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Capaian nilai SAKIP komponen perencanaan	Angka	Nilai komponen perencanaan yang diperoleh atas Evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN RB
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang baik	%	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan PD yang baik}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan PD}} \times 100$ Keterangan: Dok perencanaan baik: Nilai SAKIP Komponen perencanaan > 21
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan	%	$\frac{\text{Jumlah hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Pemerintah dan masyarakat}}{\text{Jumlah hasil Kelitbangan}} \times 100$
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelitbangan	Indeks	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

W. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Nilai	$\frac{\text{Jumlah hasil pengukuran program dan pagu per program yang sesuai}}{\text{Jumlah keseluruhan program}}$
		Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	Nilai	$\frac{\text{Jumlah hasil skor atas penyerapan anggaran}}{\text{Jumlah jenis belanja}}$
		Hasil Pengukuran Indeks Kondisi keuangan daerah	Nilai	$\frac{\text{Kemandirian keuangan} + \text{Fleksibilitas keuangan} + \text{Solvabilitas keuangan} + \text{Solvabilitas jangka pendek} + \text{Solvabilitas jangka panjang} + \text{Solvabilitas layanan}}{6}$
		Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki	%	$\frac{\text{Jumlah BMD yang telah memiliki bukti kepemilikan}}{\text{Jumlah BMD yang tercatat pada KIB}} \times 100$
2.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

X. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	%	$\frac{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan daerah}} \times 100$
		Rasio peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	$\frac{\text{Realisasi PAD tahun } n - \text{Realisasi PAD thn } n - 1}{\text{PAD tahun } n - 1} \times 100$

Y. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$
		Persentase Kompetensi ASN	%	$\frac{\text{Rata - rata Kompetensi ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}} \times 100$
		Persentase Kinerja ASN	%	$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai SKP ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}} \times 100$
		Persentase Tingkat Pendidikan ASN	%	$\frac{\text{Jumlah seluruh tingkat pendidikan ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}} \times 100$
		Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	%	$\frac{\text{Jumlah ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin}}{\text{Jumlah seluruh ASN}} \times 100$

Z. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat kepada Mitra Bakesbangpol (LSM, Ormas, FKUB)
2.	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Jumlah konflik sosial	Kasus	Jumlah kasus konflik sosial yang tidak bisa tertangani tingkat Kecamatan
		Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah potensi konflik sosia yang tertangani}}{\text{Total potensi konflik sosial yang terjadi}} \times 100$
		Jumlah konflik agama	Kasus	Jumlah kasus konflik agama yang terjadi
		Persentase potensi konflik agama yang tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah potensi konflik agama yang tertangani}}{\text{Total potensi konflik agama yang terjadi}} \times 100$

AA. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	Jumlah total dari 7 indikator yaitu Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan (0,06), Pengkajian Resiko dan Perencanaan Terpadu (0,06), Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik (0,075), Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana (0,105), Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana (0,21), Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (0,35), dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (0,14)
2.	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	$\frac{\text{Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga kabupaten}} \times 100$
		Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	$\frac{\text{Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga kabupaten}} \times 100$
		Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	$\frac{\text{Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga yang terdampak bencana}} \times 100$
		Cakupan Desa/Kelurahan Tangguh Bancana	%	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk}}{\text{Jumlah desa / kelurahan}} \times 100$

BB. KECAMATAN

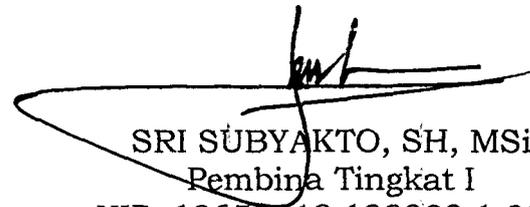
NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	1. Persentase pelayanan publik yang tersedia + 2. Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif + 3. Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan + 4. Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani + 5. Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik <hr/> 5

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006